

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya ialah proses yang berlangsung terus-menerus agar menciptakan perubahan demi kondisi lebih terarah (baik). Tujuan akhirnya ialah menjadikan masyarakat Indonesia hidup dalam keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab itu, arah pembangunan perlu dirancang dengan cermat agar benar-benar mendukung tercapainya tujuan tersebut. Konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menekankan secara jelas bahwasanya pemerintah punya tanggung jawab besar: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan bangsa, dan memastikan keadilan sosial dirasakan oleh semua. Ini berarti bahwasanya Setiap individu berhak menikmati kehidupan yang memadai. dan pemerintah berkewajiban untuk mewujudkannya. (Rahayu,Yunie, 2018)

Kemiskinan adalah ketika individu atau masyarakat tidak sanggup mencukupi keperluan dasar seperti pangan, papan, sandang, maupun pendidikan karena kurangnya pendapatan, pekerjaan dan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan. Di dalam pengentasan kemiskinan harus bersifat lintas sektoral dan terpadu. Pemerintah daerah menyadari bahwa pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kelompok yang setara dan sejahtera dengan fokus dengan pengurangan jumlah penduduk miskin sebagai salah satu dari indikator keberhasilan Pembangunan nasional. (Adriansyah, Yulmardi, Mustika, 2024)

Kemiskinan adalah persoalan yang lumayan serius yang wajib dibenahi oleh pemerintah di suatu negara. Pemerintah harus mencari solusi untuk mengurangi kemiskinan di negara tersebut. Jika tidak dilakukan penanganan bisa terjadi permasalahan lain seperti tindak kriminalitas dan kejahatan (Damayani Tika, 2022). Berdasarkan BPS jumlah penduduk di Indonesia mencapai dua ratus juta jiwa. Banyaknya jumlah penduduk tersebut tentu tidak terlepas dari banyaknya jumlah penduduk yang termasuk ke dalam golongan miskin. Berikut JPM di Indonesia pada tahun 2019-2023

**Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia 2019-2023 (Ribu Jiwa)**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2019	24.785,87
2020	27.549,69
2021	26.503,65
2022	26.363,27
2023	25.898,55

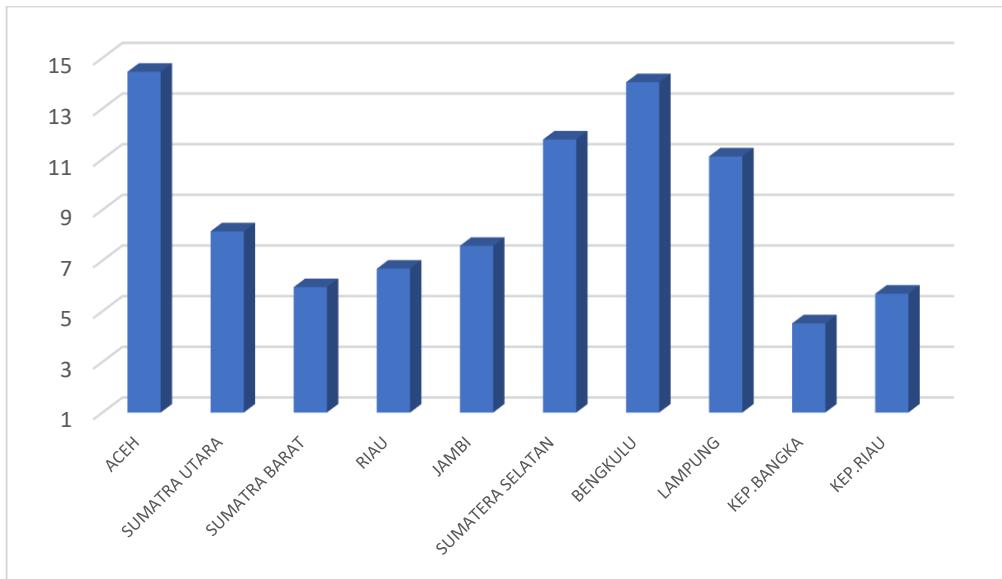
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Pada Tabel 1.1 jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode 2019-2023 terjadi kenaikan. Di tahun 2019 JPM di Indonesia tercatat dengan jumlah 24.785,87 juta jiwa dan mengalami kenaikan sebesar 27.549,69 juta jiwa di tahun 2020. Namun ditahun 2021 jumlah penduduk miskin di indonesia mengalami penurunan sebesar 26.506,65 juta jiwa dan turun kembali pada tahun 2022 mencapai 26.363,27. Penurunan di tahun 2022 hanya menurun sedikit saja. Ditahun 2023 mengalami penurunan Kembali mencapai 25.896,55. Peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 mendapat kenaikan cukup tinggi mencapai 3

juta jiwa. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu bapak Suharyanto mengungkap sejumlah faktor-faktor yang mepengaruhi kemiskinan di RI mengalami kenaikan dalam rentang waktu Maret 2020 hingga September, dan salah satu penyebab utamanya ialah pandemi Covid-19 yang meluas. Wabah ini memicu perubahan besar dalam cara orang beraktivitas, termasuk dalam sektor ekonomi dan dunia pendidikan. Dampaknya terasa nyata, terutama terhadap penghasilan para pendidik, yang pada akhirnya turut menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Faktor lainnya seperti pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi, laju inflasi umum yang relatif rendah dan lainnya.

Banyaknya jumlah penduduk miskin yang tersebar hampir di seluruh pulau yang ada di Indonesia, tentu tidak mudah bagi pemerintah pusat untuk mengatasinya. Permasalahan tersebut membutuhkan bantuan dukungan dari pemerintah daerah yang terlanda kemiskinan tersebut. Dengan begitu pemerintah pusat juga daerah harus bekerja sama guna melakukan pengentasan kemiskinan tersebut.

Menurut BPS, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera mendominasi untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi dan PDB. Dilihat dari perannya yang cukup berpengaruh dalam menyambung Produk Domestik Bruto dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, seharusnya Pulau Sumatera tidak masuk ke dalam jumlah penduduk miskin di Indonesia. Namun hal tersebut tidak seuai sebab berdasarkan BPS jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera masih cukup tinggi. Berikut grafik JPM di Sumatera tahun 2023:



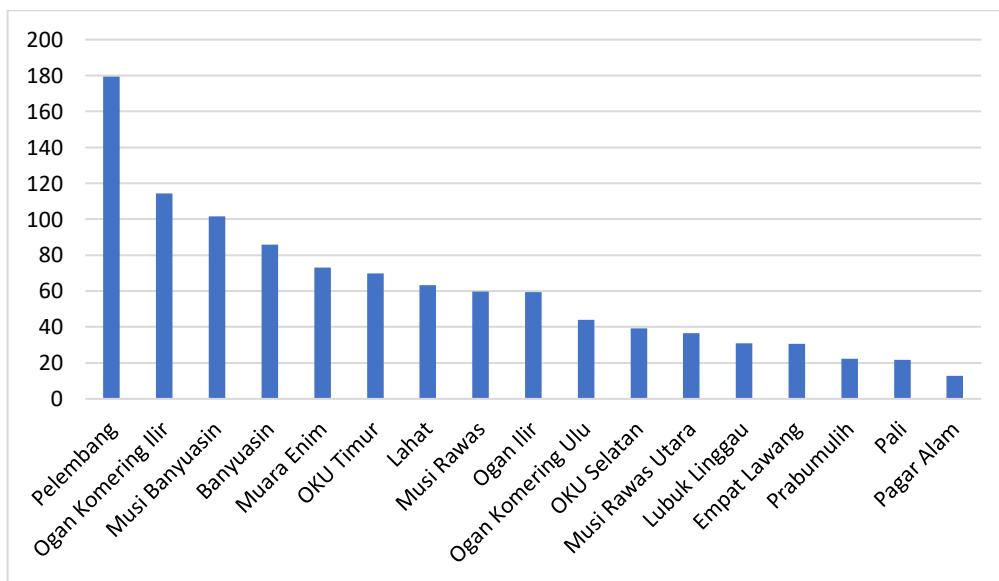
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Sumatera Tahun 2023

Dari Gambar 1.1 bisa dilihat ada 3 provinsi yang mempunyai persentase tingkat kemiskinan tertinggi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu serta Provinsi Sumatera Selatan. Dilihat dari grafik diatas provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan nomor 3 di Sumatera setalah Provinsi Aceh dan Provinsi Bengkulu. Dilihat dari kondisi strategisnya Sumatera Selatan berada pada lokasi yang strategis dan menguntungkan, Di mana daerah pantai timur ialah rute pelayaran yang berpotensi memiliki kekayaan maritim. Secara umum, lokasi geografis Sumatera Selatan memberikan keuntungan tersendiri, terutama sebagai lokasi strategis untuk pelabuhan yang bisa menghubungkan daerah ini dengan wilayah lain, baik dalam hal transportasi maupun aktivitas perdagangan. Selain itu, letaknya yang strategis juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah di wilayah ini, seperti minyak dan gas bumi, batu bara, serta lahan yang cocok untuk pertanian, perkebunan, dan kawasan hutan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki 17

kabupaten/Kota diantaranya 4 kota dan 13 kabupaten yang memiliki potensi. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai jumlah penduduk \pm 8 juta jiwa. Dari berbagai potensi yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan dari SDM (Sumber Daya Manusia) juga SDA (Sumber daya Alam) yang melimpah ruah selayaknya bisa menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Tapi, hal tersebut tidak sesuai karena Provinsi Sumatera Selatan masih jadi Provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi nomor 3 di Sumatera.

Berikut gambar jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan:

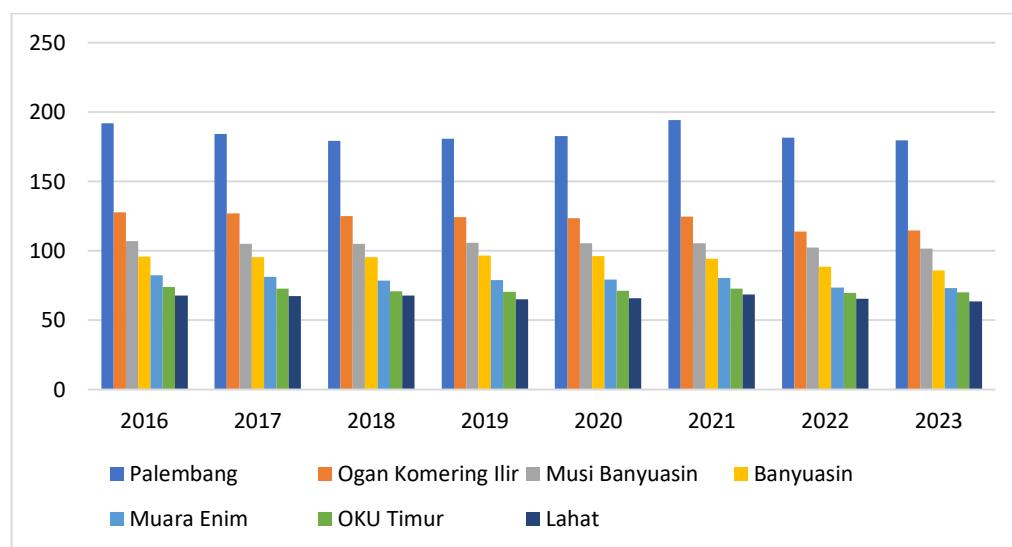


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023

Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwasanya ada 7 Kabupaten/Kota yang memperoleh jumlah penduduk miskin besar dari 60 ribu jiwa yaitu Palembang, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Oku Timur dan

lahat. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota ialah berikut ini: Palembang 179,45 ribu jiwa, Ogan Komering Ilir 114,48 ribu jiwa, Musi Banyuasin 101,63 ribu jiwa, Banyuasin 85,88 ribu jiwa, Muara Enim 73,24 ribu jiwa, OKU Timur 69,91 ribu jiwa dan Lahat 63,36 ribu jiwa. Berikut gambar jumlah penduduk miskin berdasarkan 7 Kabupaten/Kota dengan JPM paling tinggi di provinsi Sumatera Selatan.



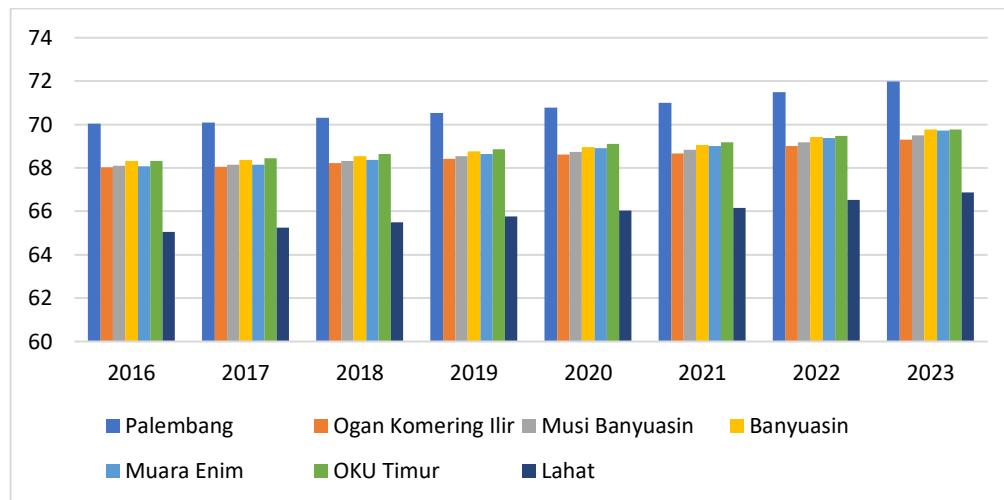
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Miskin di 7 Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk Miskin tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2023

Berdasarkan pada Gambar 1.3, bisa dilihat bahwa JPM di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2023 tidak selalu menurun tetapi cenderung berfluktasi. Palembang terus menjadi Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi tiap tahunnya. Yakni tahun 2016 jumlah penduduk miskin Palembang ± 191 ribu jiwa dan mengalami penurun setiap tahunnya namun di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar ± 180 ribu jiwa dan terus mengalami kenaikan setiap tahun dan mengalami penurunan sampai tahun 2022 yakni ± 181 ribu jiwa.

Walaupun mengalami penurunan setiap tahunnya Palembang tetap menjadi JPM tertinggi di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dibandingkan 6 kabupaten lainnya. Menjadi kabupaten/kota yang tertinggi jumlah penduduk miskinnya dikarenakan beberapa faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya mutu kesehatan dan berbagai faktor lainnya. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki JPM dengan Tingkat paling rendah di 7 Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan adalah Lahat. Dimana setiap tahunnya mengalami fluktuasi yaitu di tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Lahat sebesar ± 67 ribu dan mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar ± 65 tapi di tahun 2021 mengalami kenaikan lagi yakni ± 68 ribu jiwa dan mengalami penurunan sampai tahun 2023 sebesar ± 63 ribu jiwa. Lahat menjadi Kabupaten/Kota dengan JPM terendah di 7 Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Menjadi kabupaten/kota yang terendah dikarenakan berbagai faktor seperti peningkatan pendapatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang baik dan faktor lainnya.

Salah satu cara untuk menilai sejauh mana kondisi kesehatan masyarakat telah berkembang ialah melalui AHH. AHH sendiri menggambarkan perkiraan usia rata-rata harapan hidup masyarakat pada suatu wilayah. Kesehatan dipandang untuk bagian berharga bagi setiap orang, Yang berperan besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terkait dengan kesehatan, kebiasaan makan yang buruk juga dapat berdampak pada peningkatan angka kemiskinan. Dari laporan Badan Pusat Statistik periode 2016-2023 AHH di 7 Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Selatan memiliki angka yang berbeda-beda, dapat di lihat pada gambar grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Gambar 1.4 Angka Harapan Hidup 7 Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk Miskin Tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2023

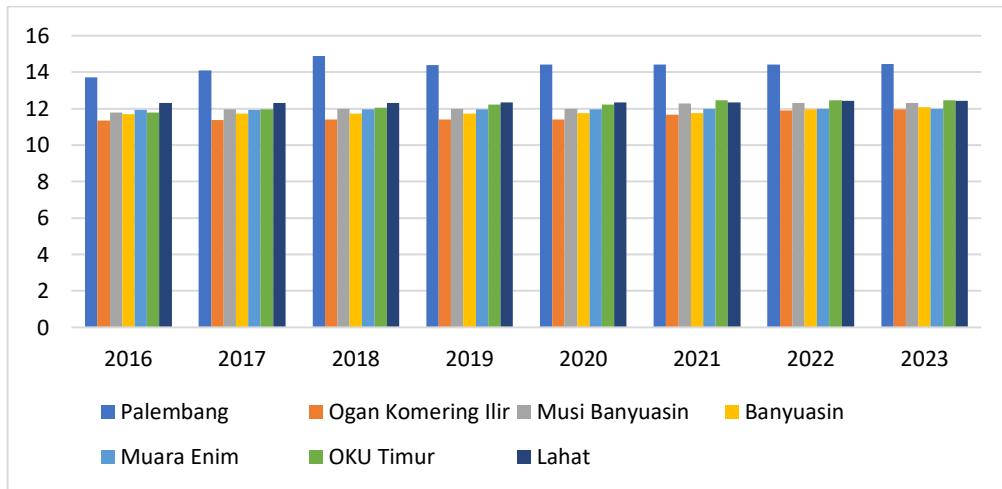
Pada Gambar 1.4 grafik diatas menggambarkan angka harapan hidup 7 Kabupaten/Kota mempunyai JPM paling tinggi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2023. Palembang menjadi Kabupaten/Kota yang mempunyai angka harapan hidup paling tinggi setiap tahunnya. Dimana angka harapan hidup di Palembang mencapai 70 tahun. Angka tersebut terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Menjadi kabupaten/kota yang memiliki angka harapan hidup tertinggi disebabkan oleh berbagai faktor seperti pelayanan kesehatan yang memadai, peratan medis yang lengkap dan berbagai faktor lainnya. Sedangkan angka dengan harapan hidup terendah berada di 7 Kabupaten/Kota tersebut adalah Lahat. Dimana angka harapan hidup Kab/Kota Lahat yaitu 66 tahun. Angka harapan hidup terendah di bandingkan dengan 6 Kab/Kota lain. Menjadi kabupaten/kota yang memiliki angka harapan hidup terendah disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya akses layanan yang memadai dan berbagai faktor lainnya.

Apabila dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin pada gambar 1.3, bahwasanya dari AHH dan Angka AHLS cenderung mengalami kenaikan dan jumlah penduduk miskin juga menurun. Hal itu sama seperti teori yang di kemukakan oleh Kementerian RI dalam (Wibowo dan Lina, 2017) dan Tobing dalam (Hastarini, 2005) bahwa Peningkatan AHH dan AHLS dari waktu ke waktu meperlihatkan bahwasanya pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas individu telah berjalan dengan baik. Hal ini mencerminkan adanya langkah nyata dalam memperbaiki akses dan mutu di bidang kesehatan dan pendidikan, yang sekaligus mendorong kemajuan kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan. (Khodijah dan Usman, 2020)

Tapi yang menjadi masalahnya ialah pada tahun 2019. Dimana pada tahun 2021 AHH di Palembang meningkat sebesar ± 71 tapi jumlah penduduk miskin turut bertambah sebesar ± 194 , kemudian di Ogan Komering Ilir AHH pada tahun 2021 meningkat ± 68 tetapi jumlah penduduk miskin turut bertambah sebesar ± 124 , selanjutnya di Musi Banyuasin AHH pada tahun 2019 meningkat sebesar ± 68 tapi jumlah penduduk miskin turut bertambah sebesar ± 105 , kemudian Banyuasin AHH pada tahun 2019 meningkat ± 68 tetapi jumlah penduduk miskin turut bertambah ± 96 , selanjutnya Muara Enim pada tahun 2021 di Muara Enim AHH meningkat ± 69 tapi jumlah penduduk miskin meningkat ± 80 . Selanjutnya OKU Timur AHH pada tahun 2021 meningkat sebesar ± 69 tetapi jumlah penduduk miskin ikut meningkat ± 72 , dan yang terakhir yaitu Lahat AHH pada tahun 2021 meningkat sebesar ± 66 namun jumlah penduduk miskin ikut meningkat ± 68 .

Winarni, et.al (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwasanya variabel AHH memberikan pengaruh negatif juga signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi NTT. Wulandari, Ismi dan Pratama, Nugraha (2022) juga menyatakan bahwasanya AHH mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Indonesia. Damayanti, Tika (2022) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwasanya angka harapan hidup berpengaruh secara negatif juga signifikan terhadap JPM di Provinsi Lampung. Sedangkan Septianingrum, Resiska dan Iskandar, Dinar (2021) menyatakan bahwasanya AHH berpengaruh secara positif juga signifikan terhadap JPM di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Faktor lain yang memungkinkan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin ialah pendidikan. Mrnutut Todaro (2013) bahwasanya sistem pendidikan yang terjadi di suatu daerah/regioan bisa membentuk serta memengaruhi pola kehidupan sosial serta kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal di region itu. Dari laporan Badan Pusat Statistik periode 2016-2023 AHLS di 7 Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Selatan memiliki angka yang berbeda-beda, bisa dilihat di gambar grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Gambar 1.5 Angka Harapan Lama Sekolah 7 Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk Miskin tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2023

Gambar diatas menjelaskan angka harapan lama sekolah 7 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi di Provinsi Sumatera Selatan periode 2016-2023. AHLS yang paling tinggi berada di Palembang yaitu mencapai 13 tahun. Angka tersebut terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Menjadi kabupaten/kota yang memiliki AHLS tertinggi disebabkan oleh banyak faktor seperti peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas pendidikan yang memadai dan berbagai faktor lainnya. Sedangkan Kabupaten/kota yang paling rendah adalah Ogan Komering Ilir yaitu sebesar 11 tahun. Meskipun angka harapan lama sekolah di Ogan Komering Ilir terus mengalami kenaikan setiap tahunnya tapi Ogan Komering Ilir tetap menjadi Kabupaten/Kota yang paling sedikit AHLS di bandingkan dengan 7 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Menjadi terendah AHLS disebababkan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi masyarakat masih kurang dan berbagai faktor lainnya.

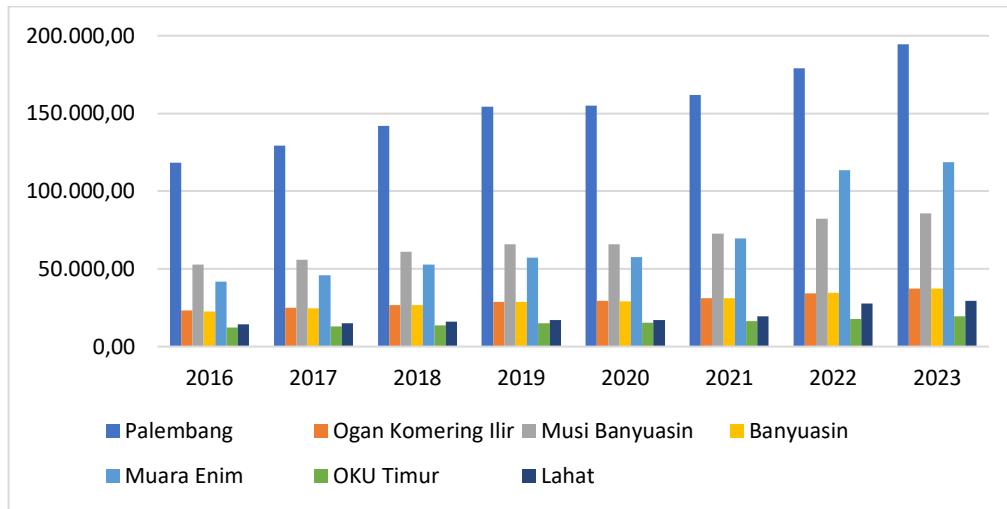
Terkait dengan data jumlah penduduk miskin pada gambar 1.3 bisa dilihat bahwasanya data AHH dan AHLS cenderung naik serta jumlah penduduk miskin ikut menurun. Ini sesuai teori yang disampaikan Kementerian Republik Indonesia dalam (Wibowo dan Lina) & Tobing dalam (Hastarini, 2005) bahwa AHH dan AHLS dari waktu ke waktu memperlihatkan bahwasanya pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas individu telah berjalan dengan baik. Hal ini mencerminkan adanya langkah nyata dalam memperbaiki akses dan mutu di bidang kesehatan dan pendidikan, yang sekaligus mendorong kemajuan kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan. (Khodijah dan Usman, 2020)

Tapi yang menjadi masalahnya ialah pada tahun 2019 dan 2021 AHLS di Palembang pada tahun 2021 menglami kenaikan ± 14 tapi jumlah penduduk miskin ikut meningkat ± 194 , kemudian di Ogan Komering Ilir AHLS pada tahun 2021 meningkat ± 11 tetapi jumlah penduduk miskin juga meningkat ± 124 , selanjutnya Musi Banyuasin AHLS pada tahun 2019 meningkat ± 11 jumlah penduduk miskin turut bertambah ± 105 , kemudian Banyuasin AHLS pada tahun 2019 meningkat ± 11 tapi jumlah penduduk miskin turut bertambah ± 96 , selanjutnya Muara Enim AHLS pada tahun 2021 meningkat ± 69 tapi jumlah penduduk miskin turut bertambah sebesar ± 80 . Kemudian OKU Timur AHLS pada tahun 2021 meningkat ± 12 jumlah penduduk miskin turut bertambah ± 72 , dan yang terakhir yaitu Lahat AHH pada tahun 2021 meningkat ± 12 jumlah penduduk miskin ikut meningkat ± 68 .

Natari, (tanpa tahun) dalam penelitiannya menyatakan pendidikan memberikan pengaruh negatif juga tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi

Aceh. Handayani, Prasetyanto, Hutajalu, (tanpa tahun) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa HLS memberikan pengaruh positif juga signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi jawa Tengah. Sedangkan Candrawati, Imaningsih, Wijaya (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Harapan lama sekolah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap JPM di Kabupaten Kebumen, dan sejalan dengan penelitian Putera, Dwi (2020) menyatakan angka harapan lama sekolah tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Tingkat kemiskinan di Indonesia.

Selanjutnya faktor yang mungkin memberi pengaruh terhadap kemiskinan ialah Produk Domestik Regional Bruto. Salah satu yang penentu kemakmuran suatu penduduk dan kejayaan Pembangunan pada suatu wilayah dilihat dari segi ekonominya, misalnya meningkatkan PDRB berpengaruh terhadap penurunan Tingkat kemiskinan di suatu wilayah (Setiawati, Irma, 2017). Dari laporan BPS Produk Domestik Regional Bruto tahun 2016-2023 7 kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan memiliki angka yang berbeda-beda, dapat di lihat pada gambar grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Gambar 1.6 PDRB 7 Kabupaten/Kota Dengan Jumlah Penduduk Miskin Tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2023

Gambar diatas menjelaskan PDRB 7 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2023. PDRB paling tinggi berada di Palembang pada tahun 2016 yaitu mencapai ± 118 miliar dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2023 yaitu mencapai ± 195 miliar. Menjadi kabupaten/kota yang tertinggi disebabkan berbagai faktor seperti peningkatan total barang dan jasa dan berbagai faktor lainnya. Selanjutnya Kabupaten/kota dengan PDRB terendah adalah OKU Timur yaitu pada tahun 2016 mencapai ± 12 miliar dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2023 yaitu mencapai ± 19 miliar. Meskipun OKU Timur mengalami kenaikan PDRB setiap tahunnya tetapi OKU Timur tetap menjadi Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB terendah diantara 7 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Menjadi kabupaten/kota dengan PDRB terendah disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan tenaga kerja, investasi yang rendah dan berbagai faktor lainnya.

Terkait dengan data jumlah penduduk miskin dan data Produk Domestik Regional Bruto di gambar 1.3 bahwa Produk Domestik Regional Bruto di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan cenderung naik dan jumlah penduduk miskin nya menurun. Namun tahun 2019 dan 2021 Jumlah penduduk miskin naik. Hal itu tidak sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi dijelaskan bahwasanya makin tinggi nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu daerah, maka akan makin banyak juga potensi sumber pendapatan bagi daerah itu. Hal ini disebabkan makin meningkatnya pendapatan masyarakat setempat. Kata lainnya, jika PDRB suatu daerah bertambah, maka mencerminkan kesejahteraan penduduknya juga semakin baik. Oleh sebab itu jumlah penduduk miskin cenderung menurun. (Alhudhori, 2017)

Khodijah, Bancin dan Usman, Umaruddin (2020) dalam penelitiannya menyatakan PDRB memberikan pengaruh negatif juga tidak signifikan terhadap JPM di Provinsi Aceh. Selanjutnya Kevin, Bhinadi, Syari'udin (2022) menyatakan dalam penelitiannya PDRB memberikan pengaruh negatif juga tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Damayati, Tika (2022) juga menyatakan dalam penelitiannya PDRB berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap JPM di Provinsi Lampung. Sedangkan Fitria, Farida (2021) menyatakan dalam penelitiannya PDRB memberikan pengaruh positif juga signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Ilmi, Bahrul (2022) menyatakan PDRB tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di 5 Provinsi dengan Tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan temuan penilitian yang dilaksanakan oleh peneliti terdahulu, yang sudah dijelaskan di setiap variabel diatas mengenai pengaruh AHH, AHLS, PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin, mendorong peniliti untuk mengamati lebih lanjut mengenai pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Produk Domestik Regional Bruto terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

Berdasarkan latar belakang diatas, jumlah penduduk miskin 7 Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan sudah menurun setiap tahunnya. Namun meski sudah menurun, tetapi jumlah penduduk miskin 7 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tersebut masih tertinggi dibanding dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut bisa disebabkan karena masih minimnya aksi pemerintah dalam menanggulangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan begitu dalam menyelesaikan Tingkat kemiskinan tersebut diperlukannya solusi yang tepat dan tentu perlu mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhinya. Mengacu pada penjelasan yang dipaparkan sebelumnya, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian “**Pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama Sekolah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang sudah ditulis atau di paparkan, berikut rumusan masalah pada penelitian:

1. Apakah Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang sudah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yakni:

1. Mengetahui pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap jumlah penduduk miskin 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Mengetahui pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) terhadap jumlah penduduk miskin 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk miskin 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Mengetahui pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), Produk Domestik Regional bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk miskin 7 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

1. Studi ini bertujuan untuk memberi pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antar Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (AHLS), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk miskin.
2. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pedoman untuk peneliti berikutnya.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi institusi Pendidikan

Penelitian ini bisa diajukan bahan pembelajaran untuk kalangan yang melaksanakan penelitian lebih lanjut memakai topik yang ada hubungan dengan judul penelitian.

2. Bagi pemerintah

Peneilitian ini bisa digunakan untuk pertimbangan bagi pemerintah memberikan pertimbangan didalam memberikan kebijakan sesuai dengan judul peneliti.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penilitian ini bisa jadi bahan acuan atau referensi untuk penulisan skripsi bagi peneliti berikutnya.